

**ANALISIS METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PPH BADAN (studi kasus pada PT. PERTAMINA EP
PANGKALAN SUSU)**

OLEH :

MUNAZAR HUSEIN

NIM 52154121

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PPH BADAN (studi kasus pada PT. PERTAMINA EP
PANGKALAN SUSU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)

Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MUNAZAR HUSEIN

NIM 52154121

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

ABSTRAK

Munazar Husein (2019), Analisis Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Hubungannya dengan PPh Badan (Studi Kasus pada PT.Pertamina EP Pangkalan Susu). Dengan Pembimbing Skripsi I Hendra Hermain, SE., M.Pd., dan Pembimbing II Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.si.

Perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut peraturan perpajakan menggunakan dua metode yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Perhitungan penyusutan menurut ketentuan pajak dilakukan juga untuk mengetahui nilai Pajak Penghasilan (PPh) suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan metode penyusutan dan hubungannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) PT. Pertamina EP Pangkalan Susu berdasarkan perhitungan perpajakan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode penyusutan aktiva tetap PT. Pertamina EP Pangkalan Susu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun metode yang digunakan tidaklah efektif dalam meminimalkan nilai Pajak Penghasilan (PPh). Pihak PT. Pertamina EP Pangkalan Susu sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan yang lama dan menggunakan metode penyusutan yang disarankan oleh penulis, karena penerapan metode penyusutan aktiva tetap sangat mempengaruhi nilai Pajak Penghasilan (PPh).

Kata Kunci : Metode Penyusutan Aktiva Tetap, Hubungan Metode Penyusutan dengan PPh.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah *Subahanahu Wata'aala*, atas segala limpahan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas izin-Nya pula sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, bukti perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad*" juga penulis sampaikan dan hadiahkan atas junjungan dan suri tauladan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang pejuang sejati yang telah membawa kedamaian di atas muka bumi Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "**Analisis Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Hubungannya dengan PPh Badan (Studi Kasus pada PT. Pertamina EP Pangkalan Susu)**" diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan secara materi maupun non materi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terspesial dan Tersayang kepada Umi dan Abi penulis, yaitu Bapak H. Hamzah Thaib, SE., dan Ibu Hj. Sarinah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan Do'a, cinta, dan kasih sayang, nasehat dan semangat serta dukungannya yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Adik-adik tersayang Juhri Ash Shidiqqi, Hafizh Mubarak, Khairani, Uswatun Hasanah yang selalu mendo'akan dan mensupport penulis.
3. Pak Ngah H.M.Amin A.ma dan Ibu Ngah Hj.Rohani yang telah banyak membantu, menjaga dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan di Medan.
4. Abangda Bunaiya Aufa dan Musawir Da'i yang telah bersedia mendo'akan dan membantu penulis, dan seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Tercinta Siti Nur Abidah Siregar yang selalu ada mensupport dan mendukung penulis dan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kusmilawaty, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
9. Bapak Hendra Hermain, SE., M.Pd selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Bapak Dr. Ridwan, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
12. PT. Pertamina EP Pangkalan Susu, terkhusus Bapak Reno Herdiyan dan seluruh pegawai Financial yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis.
13. Sahabat seperjuangan Sukani Kurniawan, Khairul Umam, Asruddin Saputra, Muhammad Jefry, Nurul Husna dan yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.
14. Keluarga Akuntansi Syariah-C 2015 yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis dari awal sampai selesai.
15. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019
Penulis

Munazar Husein
NIM . 52154121

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	5
A. Aktiva.....	5
1. Aktiva lancar	5
2. Aktiva tetap	5
B. Jenis-Jenis Metode Penyusutan:.....	7
1. Metode Garis Lurus	7
2. Metode saldo menurun	8
3. Metode jumlah angka tahun	9
4. Metode unit produksi.....	9
C. Harta Berwujud	11
1. Pengertian Harta Berwujud	11
2. Penyusutan Harta Berwujud	11
3. Metode Penyusutan Harta Berwujud.....	20
4. Koreksi Fiskal.....	22
5. Konsep Nilai Waktu Uang.....	22
D. Pajak.....	24
1. Pengertian Pajak	24

2. Pengertian Penghasilan.....	27
3. Pengertian Pajak Penghasilan.....	28
4. Tarif Pajak Penghasilan.....	28
5. Subjek pajak penghasilan	29
6. Objek pajak penghasilan.....	32
E. Manajemen Pajak (<i>Tax Management</i>)	34
1. Pengertian.....	34
2. Strategi Pajak.....	35
3. Tujuan Perencanaan Pajak.....	36
4. Alat Manajemen Pajak	37
5. Pengendalian Pajak.....	37
F. Penelitian Sebelumnya	40
G. Kerangka Teoritis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
1. Studi Kepustakaan.....	46
2. Dokumentasi.....	46
3. Wawancara	46
E. Analisis data	46
1. Menganalisa data	47
2. Menginterpretasi data.	47
3. Menarik kesimpulan.	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	49
B. Visi dan Misi	53
C. Struktur Organisasi.....	53
D. Pembahasan.....	55
E. Hasil Penelitian.....	61

1. Penerapan Perhitungan Metode Penyusutan Aktiva Tetap PT. Pertamina EP Pangkalan Susu	61
2. Hubungan Perhitungan Aktiva Tetap terhadap PPh	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	12
2. Tabel 2.2 Harta Berwujud Kelompok I.....	13
3. Tabel 2.3 Harta Berwujud Kelompok II.....	14
4. Tabel 2.4 Harta Berwujud Kelompok III	17
5. Tabel 2.5 Harta Berwujud Kelompok IV	19
6. Tabel 2.6 Tarif Pajak bagi WP Orang Pribadi.....	28
7. Tabel 2.7 Tarif PPh WP Perseorangan dan WP Badan	29
8. Tabel 2.8 Penelitian Sebelumnya	40
9. Tabel 4.1 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan	55
10. Tabel 4.2 Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun	57
11. Tabel 4.3 Perhitungan Penyusutan Metode Garis Lurus	58
12. Tabel 4.4 Biaya Penyusutan Metode Saldo Menurun	59
13. Tabel 4.5 Biaya Penyusutan Metode Garis Lurus	59
14. Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Gambar 2.1 Persentase Penggunaan Metode Psnyusutan Perusahaan .	10
2. Gambar 2.2 Kerangka Teoritis	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perhitungan Metode Penyusutan Garis Lurus
- Lampiran 2 : Perhitungan Metode Penyusutan Saldo Menurun
- Lampiran 3 : Perhitungan PPh berdasarkan Metode Penyusutan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut.

Selain biaya untuk memperoleh dan menggunakan aktiva, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran kewajiban pajak atas penggunaan aktiva tersebut. Pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisasikan dengan mengalokasikan atau menyusutkan aktiva yang masih memiliki masa manfaat. Perhitungan penyusutan dengan metode fiskal maupun komersial dapat menghasilkan nilai penyusutan yang berbeda. Dari segi pengenaan tarif serta metode penyusutan fiskal ada dua yaitu metode garis lurus dan saldo menurun, sedangkan metode pencatatan penyusutan secara akuntansi atau komersial menerapkan berbagai metode pencatatan diantaranya metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jam kerja, metode unit produksi, dan metode jumlah tahun kerja. Penyusutan adalah berkurangnya nilai aktiva tetap dalam jangka waktu tertentu karena dipakai dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, kerugian karena susutnya nilai aktiva dapat dianggap sebagai biaya dan dibebankan kepada biaya penyusutan.¹

Dalam pembayaran pajak pemilihan metode penyusutan adalah salah satu strategi mengefisienkan beban pajak, Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih,

¹Mudjihardjo, et. Al., *Panduan Pelajaran Akuntansi 2* (Bandung: PT. Eresco, 1998), h. 120.

dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (*the proper matching of cost against revenue*). Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial). Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.²

PT Pertamina EP Pangkalan Susu merupakan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pendistribusian Hulu Sektor Minyak dan Gas bumi. Dalam kegiatan operasionalnya PT Pertamina EP Pangkalan Susu menggunakan beberapa aktiva tetap diantaranya yaitu tanah, bangunan, dan berbagai peralatan lainnya. Dalam menghitung nilai penyusutan aktiva tetap PT Pertamina EP Pangkalan Susu telah membuat suatu kebijakan mengenai penggunaan metode penyusutan yang digunakan untuk mengetahui nilai penyusutan aktiva yang memiliki masa manfaat atau umur ekonomis terbatas dengan menggunakan metode penyusutan menurut peraturan perpajakan.

Dalam kebijakan akuntansi aset PT Pertamina EP Pangkalan Susu memiliki istilah Harta Benda Modal (HBM), HBM adalah aset yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, bukan merupakan material habis pakai, biaya perolehannya lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

² Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Selemba Empat, 2003), h. 32, vol. 2.4.

juta rupiah) atau mata uang asing yang setara, dan HBM diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasi atau *standby/emergency unit* dan bukan untuk disimpan sebagai persediaan, pembebanan HBM sebagai biaya operasi dilakukan melalui mekanisme penyusutan dan nilai buku HBM yang tersisa pada akhir masa manfaatnya dibebankan sekaligus.

PT.Pertamina EP Pangkalan Susu juga melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan dengan salah satu metode penyusutan, penerapan metode penyusutan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan bagaimana PT. Pertamina EP Pangkalan Susu melakukan penyusutan yang diterapkan dan apakah PPh perusahaan memiliki hubungan dengan penerapan metode penyusutan yang digunakan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis metode penyusutan aktiva yang dilakukan PT Pertamina EP Pangkalan Susu menurut ketentuan perpajakan dan hubungannya dengan pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar PT.Pertamina EP Pangkalan Susu. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Hubungannya dengan PPh Badan (studi kasus pada PT Pertamina EP Pangkalan Susu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan perhitungan metode penyusutan aktiva tetap PT Pertamina EP Pangkalan Susu sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan?
2. Bagaimana hubungan perhitungan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan (PPh) PT Pertamina EP Paangkalan Susu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini yang ingin di capai oleh peneliti yaitu:
 - a. Untuk menganalisis metode penyusutan harta berwujud yang diterapkan oleh PT Pertamina EP Pangkalan susu.
 - b. Untuk mengetahui apakah metode penyusutan yang diterapkan PT. Pertamina EP Pangkalan susu apakah memiliki hubungan terhadap PPh.
2. Manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang bersangkutan antara lain:
 - a. Bagi Penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam kasus nyata.
 - b. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk penerapan metode penyusutan aktiva tetap.
 - c. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Aktiva

Aktiva tetap atau disebut juga harta tetap (*fixed assets*) merupakan harta yang dapat digunakan berulang-ulang, yang terdiri dari harta tetap alam dan harta tetap buatan.

Harta tetap alam merupakan harta tetap pemberian alam yang dapat digunakan berulang-ulang tanpa batas waktu dan pula tidak dipengaruhi oleh keausan teknis, antara lain sebidang tanah atau lapangan (yang mempunyai nilai).

Harta tetap buatan merupakan harta tetap yang dibuat. Di dalam akuntansi lazim disebut harta tetap saja, yaitu harta yang dapat digunakan berulang-ulang dalam waktu yang terbatas, yang dibatasi oleh keausan teknis sehingga usianya terbatas, antara lain gedung-gedung.³

Aktiva (harta) perusahaan adalah segala barang fisik atau sumber daya ekonomi atau hak yang mempunyai nilai uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aktiva perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

1. Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah uang kas (tunai) atau aktiva-aktiva lainnya yang layak diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai atau dipakai habis atau dijual selama satu waktu per periode operasi-operasi normal perusahaan.

2. Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah aktiva suatu perusahaan yang sifatnya tetap atau permanen yang digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan suatu perusahaan. Aktiva tetap disebut juga kekayaan (*property*), pabrik (*plant*), dan alat-alat perlengkapan (*equipment*). Aktiva tetap digolongkan

³Radiks Purba, *Akuntansi untuk manajer*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), h. 286.

menjadi dua macam yaitu aktiva berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud.⁴

Karena pengertian harta sering diganti dengan aktiva, istilah harta tetap dapat pula diganti dengan aktiva tetap. Harta tetap atau aktiva tetap adalah harta yang jangka pemakaiannya dalam waktu lama, biasanya lebih dari setahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan nilainya cukup material.

Aktiva tetap bukan merupakan harta yang akan dijual melainkan harus digunakan dalam kegiatan perusahaan. Barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun tetapi merupakan harta yang akan dijual, dikategorikan sebagai aktiva (harta) lancar.⁵

Di dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْمَلُوا أَنْ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketauhilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji”⁶

Beberapa karakteristik aktiva tetap :

1. Mempunyai bentuk fisik yang nyata,

⁴Muhammad Yusup, *Matematika: Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 84.

⁵Alam S, *Akuntansi 3*, (Jakarta: Esis, 2001), h. 153.

⁶Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu periode,
3. Nilai yang relatif tinggi,
4. Tidak untuk dijual,
5. Sebagai alat operasional perusahaan.

Klasifikasikan aktiva tetap berwujud sebagai berikut.

1. Aktiva tetap yang disusutkan (*depreciable fixed assets*)
Contoh: komputer, mobil, bangunan, mesin, peralatan kantor, dan aktiva yang lain.
2. Aktiva tetap yang tidak disusutkan (*nondepreciable fixed assets*)
Contoh: tanah, akan tetapi tanah untuk pertambangan, perikanan, dilakukan penyusutan dan istilahnya deplasi (*depletion*)

B. Jenis-Jenis Metode Penyusutan:

1. Metode Garis Lurus

Pada metode ini, penyusutan dibebankan secara merata untuk setiap periode. Untuk menetapkan penyusutan menurut metode garis lurus (straight line method) perlu diperhatikan tiga hal, yaitu umur ekonomis, harga perolehan dan nilai residu.

- a. Umur ekonomis adalah masa pemakaian dari harta tetap yang masih mendatangkan manfaat ekonomi. Pemakaian harta tetap untuk menetapkan taksiran umur ekonomis dapat berpatokan pada kebiasaan atau disamakan dengan perusahaan sejenis.
- b. Harga perolehan adalah harga pembelian harta (aktiva) ditambah biaya-biaya lainnya sampai harta tetap tersebut benar-benar dimiliki dan siap untuk dipakai. Biaya-biaya itu antara lain harga aktiva, biaya pengiriman, dan asuransi.
- c. Nilai residu adalah nilai harta tetap setelah masa taksiran umur ekonomis selesai. Misalkan, harga perolehan mobil Rp50.000.000,00. Ditaksir umur ekonomisnya lima tahun, dan setelah lima tahun mobil tersebut masih memiliki nilai sisa sebesar Rp5.000.000,00. Nilai atau taksiran harga sebesar Rp5.000.000,00 inilah yang disebut nilai residu.

2. Metode saldo menurun

Pada penyusutan garis lurus, beban penyusutan dialokasikan secara merata setiap tahun sesuai dengan waktu pemakaian. Sedangkan untuk penyusutan dengan metode saldo menurun, mula-mula nilai penyusutannya besar. Kemudian, secara berangsur-angsur semakin kecil. Mengapa jumlah penyusutan semakin menurun? Hal ini terjadi karena nilai buku dari aktiva tetap setiap tahun makin menurun. Penyusutan seperti ini sesuai dengan kenyataan karena aktiva tetap pada awalnya memberikan manfaat yang tinggi. Namun, manfaat tersebut makin lama makin menurun seiring dengan berlalunya waktu.

Ada dua macam cara perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun yaitu dengan metode angka persen tetap atau metode tarif tetap atas nilai buku dan dengan metode menurun berganda.

Rumus penyusutan dengan metode angka persen tetap adalah:

$$\frac{T}{n} \times \text{Nilai Buku}$$

Di mana:

T = Tarif/angka persen

n = Umur ekonomis

NR = Nilai residu

HP = Harga perolehan

Seringkali, pada penyusutan metode saldo menurun, besar persentase per tahun ditetapkan sebesar dua kali lipat dari penyusutan menurut garis lurus. Karena itu, metode ini sering disebut metode saldo menurun berganda (*double declining balance method*).

$$2 \times \frac{T}{n} \times \text{Nilai Buku}$$

3. Metode jumlah angka tahun

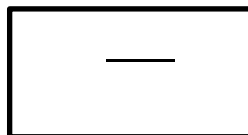
Metode penyusutan ini hampir sama dengan metode tarif tetap dari nilai buku yaitu jumlah penyusutannya yang semakin menurun. Mula-mula penyusutan tinggi makin lama makin menurun.

Untuk menghitung penyusutan menurut metode jumlah angka tahun perlu diketahui.

- a. Umur ekonomis
- b. Tetapkan jumlah yang disusutkan yaitu harga perolehan dikurang nilai residu.
- c. Penyusutan tiap tahunnya dihitung dengan suatu angka pecahan dimana penyebutnya adalah jumlah angka tahun umur ekonomis yang paling besar dan berikutnya secara berturut-turut menuju jumlah angka umur ekonomis yang lebih kecil.

Rumusnya :

Angka tahun :



Di mana :

n = Umur ekonomis aktiva tetap

4. Metode unit produksi

Pada metode ini, penyusutan dihitung atas jumlah barang yang diproduksi. Karenanya, dengan metode ini dapat dihitung tarif untuk satuan produksi atau satuan jam kerja.

Sebelum menghitung penyusutan menurut satuan produksi kita perlu mengetahui berapa jumlah produksi selama umur ekonomis. Setelah itu, kita cari jumlah yang harus disusutkan selama umur ekonomis atau selama produksi berlangsung.

Ada dua cara menghitung penyusutan dengan metode unit produksi yaitu dengan menghitung satuan produksi atau hasil barang produksi dan dengan menghitung jam kerja penggunaan aktiva.

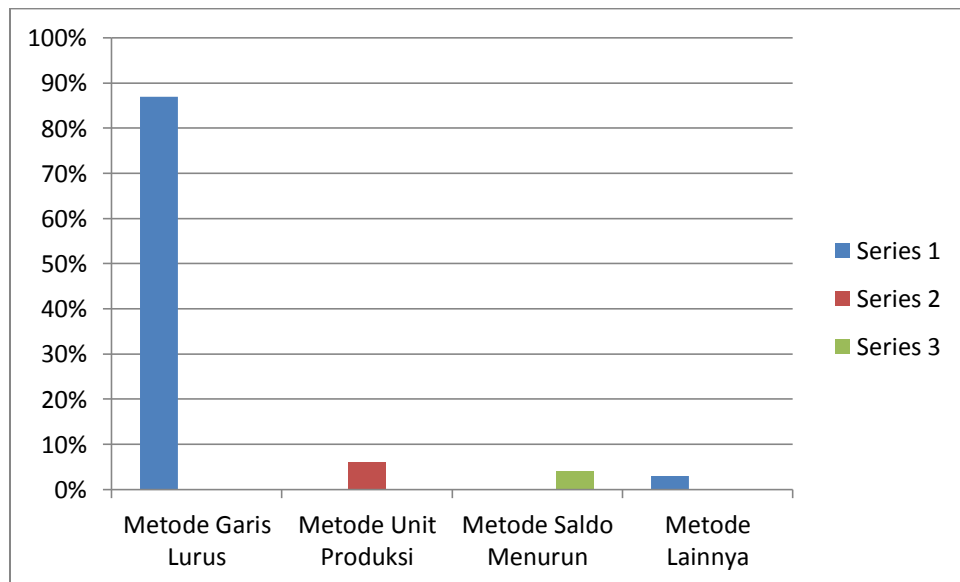
a. Metode Hasil Produksi (*Productive Out-Put Method*)

Indikator yang digunakan untuk menetapkan penyusutan per tahun adalah jumlah produksi tahun itu.

b. Metode Jam Kerja

Dalam metode ini, jam kerja menjadi patokan untuk menetapkan jumlah penyusutan.

Dari keempat metode penyusutan yang kita bahas di atas, menurut *American Institute of Certified Public Accountant*, sejenis Ikatan Akuntansi di Amerika Serikat, metode penyusutan yang digunakan sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat adalah metode garis lurus.⁷



Sumber: Accounting, Fess et. al., 19th. ed., terjemahan oleh Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gambar 2.1 Persentase Penggunaan Metode Penyusutan dalam Perusahaan

⁷Alam S, *Akuntansi 3*, h. 155-164.

C. Harta Berwujud

1. Pengertian Harta Berwujud

Menurut Standart Akuntansi Keuangan Indonesia, harta tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, atau dengan dibangun lebih dulu, untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Harta tetap antara lain adalah tanah, gedung, mesin, dan mobil.⁸

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.⁹

2. Penyusutan Harta Berwujud

Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara:

- a. Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line method*).
- b. Bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance methode*), dan pada akhir masa manfaat nilai buku akan disusutkan sekaligus, terkecuali untuk bangunan yang hanya menggunakan metode garis lurus.¹⁰

⁸Alam, *Ekonomi: untuk SMA dan MA XI*, (t.t.p.: Esis, 2007), jilid II, h. 179.

⁹Nasikhudinis, "PSAK 16-Aset Tetap: Aspek Akuntansi dan Aspek Pajaknya, <https://nasikhudinisme.com>. Diunduh pada tanggal 29 Maret 2019

¹⁰Djoko Muljono & Baruni Wicaksono (ed.) *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: ANDI, 2009).h. 135.

Sesuai dengan Undang-Undang PPh, ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan antara lain adalah:

- a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- b. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta berwujud

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 Tahun	5%	
	Tidak permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Akuntansi Pajak Lanjutan, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2003, penentuan kelompok jenis harta diatur seperti berikut:

- 1) Kelompok I
- 2) Kelompok II
- 3) Kelompok III
- 4) Kelompok IV
- 5) Kelompok Bangunan

Tabel 2.2 Harta berwujud Kelompok I

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA KELOMPOK I
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. c. Perlengkapan lain seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda, dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould. h. Komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan	Mesin ringan yang dapat dipindah-

	minuman	pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semikonduktor	Flash memory, tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Tabel 2.3 Harta berwujud kelompok II

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA KELOMPOK II
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya.</p> <p>c. Kontainer dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penebar benih, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan</p>

		perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya minyak kelapa, margarin, penggiling kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggiling beras, gandum, taploka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis.</p>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, pompa air.
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer, dan sejenisnya.
7	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang,</p>

		<p>kapal yang khusus dibuat untuk pengangkatan barang tertentu, misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sejenisnya; termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai 100 DWT.</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kapal terapung, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 20 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengirim dan penerima radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semikonduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burnin system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01) full</p>

		automatic headler, full automatic mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tibar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
--	--	--

Tabel 2.4 Harta berwujud kelompok III

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA KELOMPOK III
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil, midslnys ksain katun, lena rami, kain-kain bulu.</p> <p>b. Mesin untuk yam preparation, bleaching dyeing, printing, finishing, texturing, packaging.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian</p>

		kayu
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia, seperti: bahan kimia an-organik, persenyawaan organik dan an-organik, dan logam kimia, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya, misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah.</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya: mesin mobil, mesin kapal.
6	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal yang khusus dibuat untuk mengangkat barang-barang tertentu, misalnya: gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya, termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT</p>

		<p>b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang an helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.5 Harta berwujud kelompok IV

NO	JENIS USAHA	JENIS HARTA KELOMPOK IV
1	Konstruksi	Mesin berat untuk kosntruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer yang khusus dibuat dan dilengkapi</p>

		<p>untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu, misalnya: gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya, termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.¹¹</p>
--	--	---

3. Metode Penyusutan Harta Berwujud

PSAK Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

a. Berdasarkan Waktu

1) Metode garis lurus (*straight line method*)

$$P_n = H \times T \times b/12$$

P_n : besarnya penyusutan pada tahun ke- n

¹¹Djoko Muljono & Baruni Wicaksono (ed.) *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: ANDI, 2009).h. 137.

H : harga perolehan aset

T : tarif penyusutan

b : banyaknya bulan yang dihitung mulai dari bulan perolehan aset sampai dengan akhir tahun pajak

2) Metode pembebanan yang menurun:

a) Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)

b) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)

b. Berdasarkan Penggunaan

1) Metode jam jasa (*service hours method*)

2) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

c. Berdasarkan kriteria lainnya

1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)

2) Metode anuitas (*anuity method*)

3) Sistem persediaan (*inventory systems*)

Sedangkan berdasarkan pasal 11 UU PPh metode yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun.¹²

Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk kelompok harta berwujud dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dan harta berwujud selain (bukan) bangunan. Untuk harta berwujud selain (bukan) bangunan, Wajib Pajak diperbolehkan memilih metode penyusutan, yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Dengan kata lain, metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus (*straight-line method*) atau saldo menurun (*declining balanced method*) yang mana pada akhir masa manfaat

¹² Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, ed. 4, 2008), h. 34.

nilai sisa buku disusutkan sekaligus (*closes ended*). Untuk harta berwujud bangunan, Wajib Pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Perhitungan penyusutan tiap tahun untuk metode garis lurus adalah harga perolehan bagi masa manfaat. Jika terdapat nilai residu maka tidak boleh dikurangkan dari harga perolehan. Perhitungan penyusutan setiap tahun untuk metode saldo menurun adalah tarif penyusutan dikalikan nilai sisa buku.¹³

4. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim. Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

- a. Beda tetap
- b. Beda waktu¹⁴

5. Konsep Nilai Waktu Uang

Yang dimaksud dengan konsep nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan

¹³Indra Efendi Rangkuti, et. al., *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus* (Medan: Madenatera, 2018), h. 83.

¹⁴Djoko Muljono & Baruni Wicaksono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, h. 59.

tahun-tahun yang akan mendatang. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap, kita perlu memperhatikan nilai waktu uang.

Atau bisa kita katakan bahwa uang yang sekarang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima dimasa yang akan mendatang. Nilai waktu dari uang erat kaitannya dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang.

Nilai waktu dari uang akan menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu atau nilai uang dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu.¹⁵

a. Nilai Majemuk

Nilai Majemuk (*compound value*) adalah merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan/pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu, apabila bunga tidak diambil pada setiap saat.

Jadi F (*Future*) untuk tahun ke – n:

$$F_n = p (1 + i)^n$$

Dimana:

F_n = besarnya pokok dan bunga pada tahun ke-n

P = besarnya pokok pinjaman

i = tingkat bunga

n = jumlah tahun

Dalam praktek $(1 + i)^n$ telah dituangkan dalam bentuk tabel yang diistilah dengan interest factor (IF) sehingga rumus tersebut akan menjadi:

$$F_n = P (IF) n$$

b. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Present Value (nilai sekarang) merupakan kebalikan dari *compound value* (nilai majemuk) adalah besarnya jumlah uang, pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu/periode yang akan datang.

¹⁵Nur Rohman, "Pengertian Konsep Nilai Waktu Uang dan Contohnya, <https://akuntanonline.com>. Diunduh pada tanggal 6 April 2019

Jadi *present value* menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian.

$$P = F_n / (1 + i)^n \text{ atau } P = F_n (1+i)^{-n}$$

Dimana :

F_n = nilai yang akan datang/*future value* tahun ke- n

P = nilai sekarang/*present value*

i = tingkat bunga

n = jumlah tahun

Faktor $(1+i)^{-n}$ diistilahkan Discount factor¹⁶

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.¹⁷

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

¹⁶Mersey Side, "Nilai Waktu Uang (Time Value of Money), <http://kazekage08suna.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 6 April 2019

¹⁷Indra Efendi Rangkuti, et. Al., *Perpajakan indonesia: Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, ed 3, 2018), h.2.

- b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib pajak.¹⁸

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. di dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus* :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

¹⁸Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan* (Jakarta: PT Grasindo, Cet.2, 2004), h. 6

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.¹⁹

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah:

“apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.²⁰

Di dalam Al-quran Allah Swt. Berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”.²¹

Dalam tata keuangan Negara Islam, dikenal empat jenis pungutan:

¹⁹Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan kasus* (Jakarta: Selemba Empat, ed.6, 2013), h. 1-2.

²⁰Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “Hukum Pajak dalam Fiqih Islam, <https://abufawaz.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2019

²¹Q .S. Al-Hujurat (49): 15.

- a. Zakat Mal, dan Zakat Jiwa: Pungutan ini hanya diwajibkan atas umat Islam.
- b. *Al Jizyah* (Upeti)/pungutan atas jiwa: Dikenakan atas ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam.
- c. *Al Kharaj* (semacam pajak bumi): Dikenakan atas ahlul kitab yang menggarap tanah/lahan milik negara Islam. Hasil kedua pungutan dari ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam ini digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan Islam.
- d. *Al 'Usyur atau Nisfu 'Usyur*: *Al 'Usyur* (atau 1/10) adalah pungutan atas pedagang ahlul harb (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), di pungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan *Nisfu 'Usyur* (1/20) adalah pungutan atas para pedagang ahlul zimmah, orang kafir yang menghuni negeri Islam.²²

2. Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.²³

Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.²⁴

²²Redaksi Konsultasi Syariah, “Hulum Pajak dan Bekerja di Pajak, <https://konsultasisyariah.com>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2019

²³Belajar Perpajakan, “Pengertian Penghasilan, www.pajakonline.com. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019

²⁴Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, h. 80.

3. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut PSAK no.46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas serta jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.²⁵

4. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku menurut pasal 36 UU Pajak Penghasilan Tahun 2008 dibagi menjadi 2, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan tarif pajak progresif dan dikenakan secara berlapis sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak proporsional sebesar 28%. Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka, yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan ini akan diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010. Lapisan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditentukan sebagai berikut:

TABEL 2.6 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00-Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00-Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Buku Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan²⁶

²⁵Adi Dwi Prasetyo, "PSAK no 46 Pajak Penghasilan, <https://dconsultingbusinessconsultant.com>. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019

²⁶Supramono and Theresia woro Damayanti (ed.) *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 44.

Pemilihan bentuk usaha oleh pengusaha dapat dilakukan dengan memperhatikan besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang akan terutang. Besarnya tarif PPh yang akan terutang setiap tahun antara Wajib pajak perseorangan dengan Wajib Pajak Badan adalah berbeda, yaitu seperti berikut:

TABEL 2.7 Tarif PPh WP Perseorangan dan WP Badan

No	Perseorangan		Badan	
	Batasan Penghasilan kena Pajak	% Tarif PPh Progresif	Batasan Peredaran Usaha	% Tarif Tetap
1	s.d 50 Juta	5%	s.d 4,8 milyar	12,5%
2	Lebih 50 Juta s.d 250 Juta	15%	4,8 milyar s.d 50 milyar	25%-12,5% (4,8 peredaran bruto)
3	Lebih 250 Juta s.d 500 Juta	25%		
4	Lebih 500 Juta	30%	Lebih 50 milyar	25%

Sumber: Buku Tax Planning: Menyasati Pajak dengan Bijak²⁷

5. Subjek pajak penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek

²⁷Djoko Muljono, *Tax Planning: Menyasati Pajak dengan Bijak*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 5.

Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen;
- 2) cabang perusahaan;
- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel;
- 7) gudang;
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet;.²⁸

6. Objek pajak penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya

²⁸Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, h. 75-76.

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan ;

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jumlah pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. surplus Bank Indonesia²⁹

²⁹Ibid., h. 80-84.

E. Manajemen Pajak (*Tax Management*)

1. Pengertian

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin.

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, Wajib Pajak harus memahami mengenai peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak, Peraturan Perpajakan, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan selalu mengikuti perkembangan serta perubahannya. Dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam mengelola pajaknya agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berfungsi dengan baik dan tindakan Wajib Pajak tersebut tidak termasuk dalam tindakan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak. Apabila perusahaan berhasil dalam mengelola pajaknya maka akan diperoleh penghematan pajak, dimana keuntungan dari penghematan pajak ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam pengeluaran lain yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.

Berkaitan dengan perpajakan, seorang manajer perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Rencana pajak yang akan dibayar dalam suatu tahun pajak
- b. Cara pembayaran pajak yang efisien
- c. Menyusun strategi penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan
- d. Rencana penggunaan dana hasil penghematan pajak

Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif *tax*

management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif.³⁰

2. Strategi Pajak

Dalam perpajakan ada yang disebut sebagai strategi pajak, strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

a. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.³¹

Pekerjaan perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. *Tax Compliance*

b. *Tax Planning*

c. *Tax Litigation*

d. *Tax Research*

Jadi manajemen perpajakan merupakan bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha

³⁰Chairul Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 5.

³¹*Ibid.*, h. 11.

dimulai. Pelaksanaan manajemen perpajakan harus ekonomis, efisien, dan efektif.³²

3. Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan.

b. Memaksimalkan laba setelah pajak.

c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- 1) Memenuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
- 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-Undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal.³³

³²Ibid., h.8.

³³Ibid., h, 21.

4. Alat Manajemen Pajak

Alat manajemen pajak yaitu:

- a. Memahami peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan tersebut maka diharapkan dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.
- b. Menyelenggarakan pembukuan: Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Dengan informasi yang terdapat dalam pembukuan maka jumlah pajak terutang dapat dihitung.

5. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.³⁴

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

³⁴Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, h. 10.

Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut. Perencanaan pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melunasi utang-utang pajaknya.

Perencanaan pajak memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek formal dan administratif

Aspek formal yang harus diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak adalah bahwa Wajib Pajak harus patuh pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari, dan hal itu dapat ditempuh melalui perencanaan pajak yang baik. Tentunya untuk dapat menyusun suatu perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta mengikuti perkembangan agar bila ada perubahan peraturan dapat segera diaplikasikan terhadap perencanaan pajak yang telah disusun. Sedangkan aspek administratif meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak dan melaporkan pajak sebelum jatuh tempo.

b. Aspek material

Pajak dikenakan terhadap Objek Pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek Pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administratif yang merupakan pemborosan dana).

Dengan demikian Objek Pajak yang dilaporkan, secara material harus benar dan lengkap serta tidak ada rekayasa negatif.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka setiap Wajib pajak harus dapat menyusun perencanaan pajak yang baik dan menghindari pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi karena merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras (*hard work*) dan bekerja secara cermat (*work smartly*).³⁵

Oleh karena itu, dalam menyusun *tax planning*, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Mempertimbangkan dampak perpajakan dari setiap transaksi yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak yang sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaan.
- 2) Pemahaman mengenai masalah perpajakan meliputi UU pajak, peraturan pemerintah (PP), Permenkeu, Perdirjen, Surat Edaran (SE). Pemahaman ini termasuk kemampuan untuk menerapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.
- 3) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- 4) Secara bisnis masuk akal. Perencanaan merupakan bagian dari *corporate global strategy*.
- 5) Didukung bukti-bukti yang memadai.

Perencanaan pajak memiliki beberapa manfaat, berikut beberapa manfaat dari perencanaan pajak yaitu:

a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

³⁵Ibid., h. 7-8.

b. Mengatur aliran kas

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh :

- a. *Ignorance* (ketidaktahuan)
- b. *Error* (kesalahan)
- c. *Misunderstanding* (kesalahfahaman)
- d. *Negliance* (kealpaan)

F. Penelitian Sebelumnya

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh penyusutan aktiva tetap terhadap pajak:

Tabel 2.8 Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Christovint, Julie J Sondakh, Harijanto Sabijono (2015)	Evaluasi perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut peraturan perpajakan serta pengaruhnya terhadap pajak penghailan (PPh) pada	Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	PT BTN kantor cabang Manado telah melakukan perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak ditemukan adanya koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aktiva tetap PT BTN kantor cabang Manado, perhitungan penyusutan yang dilakukan sudah

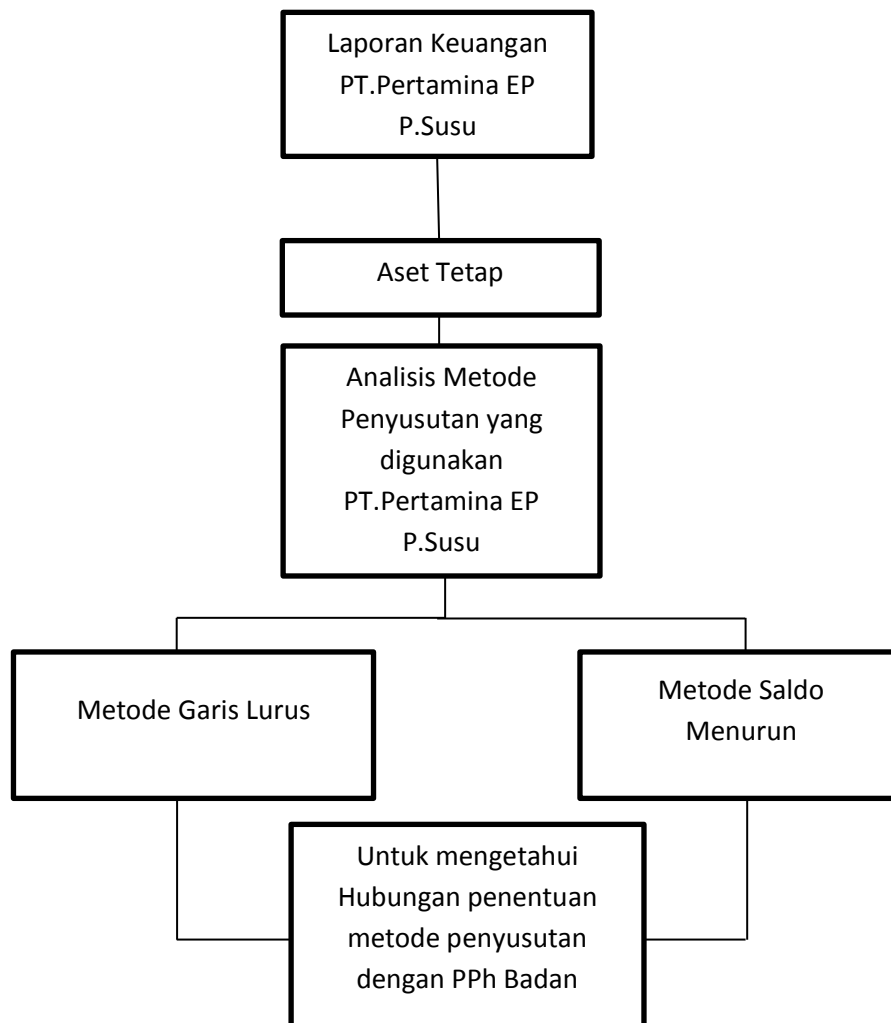
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang Manado		sesuai dengan peraturan perpajakan namun masih ada kekeliruan sehingga menimbulkan selisih nilai dengan perhitungan penyusutan perpajakan.
2	Aswin yudhi gunawan (2009)	Analisis pemilihan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk meminimalkan beban pajak (studi kasus pada PT. Telekomunik asi Indonesia, Tbk. Bandung)	Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus,yaitu penelitian yang memusatkan pada suatu objek tertentu secara langsung dalam perusahaan,teknik analisis data yaitu mempelajari angka-angka yang terdapat dalam tabel harta berwujud bukan bangunan dan menyusun sesuai kelompoknya masing-masing	Hasil penelitian bahwa metode saldo menurun lebih tepat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan karena menghasilkan total pajak penghasilan terutang yang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode penyusutan garis lurus.

3	Glantino A. Ratag (2013)	Perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPH Badan pada PT.Bank Sulut	Jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa studi deskriptif, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif	Hasil penelitian bahwasanya perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus menghasilkan pajak yang harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan metode saldo menurun yang sudah digunakan oleh perusahaan
4	Silvy Amelia (2013)	Analisis koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap pada CV. Mitra Agro Permai	Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, dengan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan nilai penyusutan menurut komersial Rp 475.114.786,00 dan menurut fiskal Rp 315.875.235,00 dengan nilai koreksi fiskal sebesar Rp 115.239.551,00. sehingga nilai PPh perusahaan Rp 18.563.395,70 sedangkan menurut fiskal berjumlah Rp 164.019.288,30. Selisih sebesar Rp 35.455.892,60
5	Ajeng C	Perhitungan	Meetode	Hasil penelitian dari

	Mardjani (2015)	penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT. Hutama Karya Manado	penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif	penelitian ini adalah beban penyusutan aset tetap yang dihitung perusahaan dengan metode garis lurus setiap bulannya telah diakui dengan baik, namun belum konsisten.
--	--------------------	---	---	--

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada dasarnya adalah kerangka hubungan antar konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan diatas maka model kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Teoritis

Keterangan: Mempelajari laporan keuangan PT.Pertamina EP Pangkalan Susu, dan kemudian mempelajari aset tetap PT.Pertamina EP Pangkalan Susu, kemudian melakukan analisa penggunaan dan perhitungan metode penyusutan yang digunakan, kemudian menganalisa metode penyusutan dan perhitungan penyusutan yang sesuai peraturan perpajakan, kemudian melihat hasil dan membandingkan metode yang digunakan perusahaan dengan metode penyusutan sesuai perpajakan dan melihat hubungannya terhadap PPh Badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. PERTAMINA EP ASSET 1 Pangkalan Susu Field, jalan samudera no.1 Pangkalan Susu 20858, Sumatera Utara. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Juli 2019

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.³⁷ Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Penelitian ini mengambil data yang diperoleh dari dokumentasi dan laporan keuangan PT.Pertamina EP P.Susu dan dari website link lainnya yang memberikan tambahan informasi tentang masalah dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Pertamina EP Pangkalan Susu dari tahun 2013 sampai

³⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, cetakan pertama, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h.4

³⁷ Arfan Ikhsan, et. Al, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, cetakan pertama, (Medan : Madenatera Indonesia, 2014), h.122.

tahun 2015 yang terdiri laporan laba rugi dan data rincian aktiva tetap bukan bangunan.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca buku-buku atau jurnal-jurnal sebagai landasan analisis dan rumusan teori atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menilai data-data historis, yaitu berupa laporan keuangan tahunan 2013 sampai dengan tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi dan data rincian aktiva tetap

3. Wawancara

Tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan khususnya pada bagian financial mengenai metode perhitungan penyusutan.

E. Analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Dalam penelitian analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis respondennya.³⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis data kualitatif. Beberapa teknik dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h .77

1. Menganalisa data

Analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuan dari analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan antar variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah penelitian.

2. Menginterpretasi data.

Setelah data diolah sedemikian rupa, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dan interpretasi data. Dalam melakukan kegiatan analisis data, data yang ada disederhanakan sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasi data dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, interpretasi yang dilakukan dengan cara terbatas, yakni peneliti hanya melakukan interpretasi terhadap data dan hubungan yang terdapat dalam penelitian. Kedua interpretasi yang dilakukan dengan cara mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisis. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan kesimpulan yang diperoleh dari peneliti lain dengan menghubungkan dengan teori yang ada.

3. Menarik kesimpulan.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, peneliti terlebih dahulu melakukan proses generalisasi. Generalisasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembentukan gagasan atau simpulan umum dari suatu hal. Proses generalisasi harus mengacu pada teori yang mendasari penelitian.

Sedangkan dalam menganalisis data rincian aktiva tetap bukan bangunan dan laporan keuangan perusahaan, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Membuat daftar harta berwujud bukan bangunan yang akan disusutkan dengan dua metode penyusutan;

2. Menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan mulai tahun 2013 sampai 2015 dengan metode penyusutan saldo menurun dan metode penyusutan garis lurus;
3. Membandingkan besarnya biaya penyusutan antara metode penyusutan saldo menurun dengan metode penyusutan garis lurus mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
4. Menghitung dan membandingkan besarnya pajak penghasilan berdasarkan metode penyusutan saldo menurun dan metode penyusutan garis lurus mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
5. Melihat hubungan antara metode penyusutan aktiva tetap dengan Pajak Penghasilan;
6. Memilih metode penyusutan yang menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang paling kecil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. PERTAMINA PERSERO Pangkalan Susu merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang pertambangan minyak dan gas (MIGAS). Perusahaan ini berada sekitar 110 km sebelah Barat Laut kota Medan atau sekitar 24 km arah Barat kota Pangkalan Berandan adalah merupakan lapangan minyak dan gas bumi tertua dalam catatan sejarah Pertambangan dan Industri Perminyakan Indonesia, yaitu sejak struktur Telaga Said ditemukan pada tanggal 31 Juli 1876 oleh Aeilko Janszoon Zijlker, ahli perkebunan tembakau “Deli Tobacco Maatschappij” yang berkebangsaan Belanda itu. Setelah memperoleh konsensi dari Sultan Langkat (Musa) pada tanggal 8 Agustus 1883, Zijlker yang telah menghimpun dana dari beberapa temannya di Negeri Kincir Angin itu melaksanakan pengeboran sumur minyak pertama di Telaga Tiga.

Sementara itu Pertamina Lapangan EP (Eksplorasi & Produksi) Pangkalan Susu yang berdasarkan SK Direksi No dua wilayah KPTS – 070 / C0000 / 94-S8 tanggal 11 Mei 1994 telah diganti sebutannya menjadi Asset Pangkalan Susu adalah merupakan salah satu dari dua wilayah operasional Pertamina DOH NAD –Sumbagut, yaitu Asset Rantau, berkedudukan di Rantau, Aceh Timur dan Asset 80 Pangkalan Susu berkedudukan di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tapi kini dikenal dengan sebutan Area Operasi Pangkalan Susu.

Sampai dengan tahun 1998 telah dibor sebanyak 988 sumur di wilayah Area Pangkalan Susu yang tersebar di 37 struktur tercatat sebanyak 97 sumur yang berproduksi, 237 sumur ditangguhkan dan 654 sumur berstatus ditinggalkan.

Sementara wilayah kerja Pertamina Area Operasi Hulu Pangkalan Susu di Provinsi Sumatera Utara tercatat seluas sekitar 14.211,74 Km², termasuk di dalamnya wilayah kabupaten langkat yang dikuasai oleh Pertamina ada seluas

8.377.586,37 m² sisanya berada di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Madya Binjai. Cadangan migas Area Operasi Pangkalan Susu berada di dalam cekungan Sumatera Utara. Cekungan ini merupakan cekungan Tersier yang di belahan Timur Laut dibatasi Paparan Sunda, di sebelah Selatan dibatasi Busur Asahan dan di sebelah Barat Daya dibatasi Pegunungan Bukit Barisan.

Sementara untuk kelancaran pengiriman minyak dan gas bumi dari sumur-sumur migas yang bertebaran di struktur-struktur produktif sampai ke Tank Meter dan tempat penampungan di Tank Yard, Bukit Khayangan, Pangkalan Susu yang nantinya akan disalurkan ke kilang BBM UP-I Pangkalan Berandan dan kilang lainnya, termasuk pengiriman gas untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN) dan sebagainya, di Area Operasi Pangkalan Susu terdapat sebanyak 6 (enam) Stasiun Pengumpul /Stasiun Kompresor (SP/SK) yang dilengkapi dengan 32 unit kompresor dari berbagai jenis dan ukuran. Kompresor-kompresor tersebut dipergunakan untuk melayani pasokan migas dari struktur-struktur yang ada di Area Operasi Rantau, Aceh Tamiang, dan dari struktur di Area Operasi Pangkalan Susu untuk disimpan di Tank Yard, Bukit Khayangan, Pangkalan Susu atau langsung dikirim ke kilang BBM di Pangkalan Berandan atau dikapalkan ke kilang BBM di Cilacap / Lawi-lawi.

Pelabuhan Minyak Pangkalan Susu yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1898 adalah merupakan pelabuhan pengeksport minyak tertua di Indonesia yang peraiannya tidak dapat dimasuki oleh Tanker berukuran besar, maka dibangun Single Bouy Mooring di lepas pantai Teluk Haru, kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang miniaturnya dapat dilihat dalam bentuk Tugu di tepi jalan raya lintas Sumatera, tepatnya di Simpang Tiga Pangkalan Susu Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang merupakan satu-satunya jalan masuk ke kota Pangkalan Susu (Pusat Perkantoran Pertamina Area Operasi Pangkalan Susu).

Perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama Pertamina untuk menanganinya secara serius, dan ini memang sudah menjadi komitmen

Pertamina sejak dibentuknya Badan Koordinator Lindungan Lingkungan (BKLL) pada tanggal 7 Juni 1973. Pembentukan BKLL dapat juga diartikan sebagai deklarasi komitmen kegiatan industri perminyakan nasional.

Sejalan dengan adanya kebijakan restrukturisasi yang implementasinya telah melahirkan Surat Keputusan Direksi No.: KPTS-070/C0000/94 – S8 tanggal 11 Maret 1994, maka terhitung mulai 1 April 1995 struktur organisasi Pertamina DOH Rantau Asset Pangkalan Susu yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Kepala Lapangan, dan sebutan Kepala Lapangan kemudian diganti sebutannya menjadi Manager Asset yang tugas operasionalnya membawahi wilayah kerja Pertamina Asset Hulu Pangkalan Susu di Sumatera Utara dan berkantor di Pangkalan Susu. Sedangkan kantor induknya berada di Rantau, Aceh Tamiang yang dikenal dengan sebutan Pertamina Daerah Operasi Hulu Rantau atau biasanya disingkat dengan PERTAMINA DOH RANTAU.

Ketika stuktur baru terbentuk berdasarkan SK Dirut Pertamina No.Kpts-004/C00000/2001-SO tanggal 11 Januari 2002, maka sebutan Manager Asset diganti menjadi Manager Area Operasi, dan sebagai Top Manajemen di Area Operasi Pangkalan Susu yang membawahi fungsi Perencanaan Operasi, Operasi Poduksi, Work Over & Well service dan Pemeliharaan. Sedangkan fungsi – fungsi lainnya seperti, Pml Top/Aip, KK/LL, Utilities, Infokom, Pergudangan, SDM, Keuangan, Sekuriti dan Hupmas secara administrasi tunduk kepada Manager masing-masing baik yang berkedudukan di Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 23 November 2001 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada tanggal 18 Juni 2003, maka melalui Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH tanggal 17 September 2003, Pertamina telah resmi berubah

statusnya dari BUMN menjadi Perusahaan Perseroan PT PERTAMINA (PERSERO).

Peran regulator di sektor hulu selanjutnya dijalankan oleh BPMIGAS yang dibentuk pada tahun 2002. Sedangkan peran regulator di sektor hilir dijalankan oleh BPH MIGAS yang dibentuk dua tahun setelahnya pada 2004. Di sektor hulu, Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang merupakan kepanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Ini merupakan wujud implementasi amanat UU No.22 tahun 2001 yang mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha hulunya sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir.

Atas dasar itulah PT Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui Perundangan yang berlaku. Sebagian besar wilayah PT Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina EP. Pada saat bersamaan, PT Pertamina EP melaksanakan penandatanganan KKS dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku sejak 17 September 2005.

Dengan demikian WK PT Pertamina EP adalah WK yang dahulu dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sendiri dan WK yang dikelola PT Pertamina (Persero) melalui TAC (Technical Assistance Contract) dan JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery) dengan tingkat pertumbuhan produksi rata-rata 6-7 persen per tahun, PT Pertamina EP memiliki modal optimisme kuat untuk tetap menjadi penyumbang laba terbesar PT Pertamina (Persero). Keyakinan itu juga sekaligus untuk menjawab tantangan

pemerintah dan masyarakat yang menginginkan peningkatan produksi migas nasional.

B. Visi dan Misi

Pertamina EP merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi yang mempunyai Visi dan Misi, yaitu:

1. Visi

Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia.

2. Misi

Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik, serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup.

C. Struktur Organisasi

1. Level Board of Director

Level Board of Director merupakan jajaran direksi dan pimpinan tertinggi dalam menjalankan perusahaan dan memegang kekuasaan penuh terhadap arah kebijakan yang diambil. Board of Director terdiri dari Exploring and New Discovery Project Director, Development Director, Production and Operation Director, dan Finance and Business Support Director.

2. Level Top Management

Level Top Management terdiri dari semua General Manager pada beberapa wilayah kerja PT. Pertamina EP. General Manager bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengarahkan terhadap apa yang menjadi masa depan perusahaan. Dalam fungsinya, seorang General Manager dibantu oleh beberapa manager yang memiliki fungsi spesialis. Keputusan atau kebijakan dari seorang General Manager adalah kebijakan tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh manager di perusahaan.

3. Level Manager

Level Manager terdiri dari semua Senior Manager, Manager, dan Assistant Manager pada semua divisi yang terdapat pada PT. Pertamina EP. Manager bertanggungjawab dalam perencanaan awal dan pencapaian tujuan perusahaan sesuai tugas, fungsi, dan divisinya. Manager juga harus mampu dalam memimpin timnya, mendelegasikan tugas secara efektif, mengambil keputusan, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya.

4. Level Staff

Level Staff terdiri dari semua Senior Staff, Staff, Analyst, dan Operator yang ada pada PT. Pertamina EP. Staff bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai fungsi dan keahliannya masing-masing.

Bagian-bagian dalam struktur :

PT. PERTAMINA EP ASSET 1 PANGKALAN SUSU :

1. GM ASSET 1
2. P.Susu Field Manager
3. Asistant Manager :
 - a. Engineering & Planning Asistant Manager
 - b. Workover/Well Service Asistant Manager
 - c. Prduction Operation Asistant Manager
 - d. RAM Asistant Manager
 - e. HSSE Asistant Manager
 - f. HR Asistant Manager
 - g. Finance Asistant Manager
 - h. Legal & Relation Asistant Manager
 - i. SCM Asistant Manager
 - j. Rantau & P. Susu ICT Asistant Manager :
 - 1) Pangkalan Susu ICT Operation Staff
 - 2) Pangkalan Susu And User Support Staff

D. Pembahasan

1. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan

Tabel 4.1 Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan

No	Cap date	Asset description	Acq Value ALL	Jumlah Tahun Penyusutan
1	2015	2 PHASE FUEL GAS SCRUBBER	\$ 90.182,41	5
2	2015	DE - ETHANIZER TOWER	\$ 357.750,52	5
3	2013	SUMUR GAS A1	\$ 4.101.696,50	5
4	2013	CASING-1	\$ 647.046,84	5
5	2013	GAS KROMATOGRAP GC-17A WITH 2 DETECTOR	\$ 332.233,17	4
6	2013	CASING GC5 (1880 m)	\$ 160.822,61	5
7	2013	2 PORTABLE FIRE PUMP 4 SUCTION 100 PSI	\$ 73.306,78	4
8	2013	DISPERSANT SPRAYER FIRE STATION	\$ 544.472,97	4
9	2015	DIESEL ENGINE FIRE PUMP 2000 GPM	\$ 230.000,00	4
10	2015	RUMAH CONTROL ROOM	\$ 13.163,63	5
11	2009	1 UNIT FIRE TRUCK KAP. 5000 LTR PEMADAM	\$ 171.940,86	5
12	2009	1 UNIT SPEED BOAT MERK HAKISU	\$ 58.363,64	9
13	2009	1 UNIT BULDOZER TYPE D4 UTK TOPO	\$ 101.963,35	5
14	2009	LOADING LINE 30" 500 M DARI MGS KE LOCAL 2	\$ 388.809,76	5
15	2009	PIPA 14" X 2.000M ANTAR TANKI	\$ 330.771,21	5
16	2009	PIPA 12"X2.500M	\$ 434.449,30	5
17	2009	SBM ARUBAY	\$ 2.012.663,41	5
18	2009	CENTRIFUGAL PUMP KAP. 30 M3/JAM PPP	\$ 24.466,41	5
19	2009	1 TRANS PUMP C/W GAS ENG.SP3&8 (1OF2)	\$ 436.208,51	5
20	2011	GENSET 30KVA *U267893V*	\$ 27.914,90	5
21	2011	FIRE PROTECTION	\$ 40.499,56	4
22	2011	FIRE PROTECTION	\$ 42.654,90	4
23	2011	SPIRAL DRI COLAR 31/2" HOIST BIR 100	\$ 2.909,38	4
24	2011	MAINLINE FLOATING HOSE 12" 22130.12	\$ 147.654,95	5
25	2011	SISTEM PROTEKSIKATODIK PIPA30"	\$ 142.761,80	4
26	2012	GASFLOW COMP C/W 3 PENRECORDER	\$ 273.989,92	4
27	2012	FIRE PUMP LIGHT WEIGHT	\$ 49.309,69	4
28	2014	2 UNIT GENSET,NATURAL GAS ENGINE KAP.62.5	\$ 141.108,08	5
29	2014	PORTABLE FIRE PUMP KAP. 500 GPM	\$ 45.493,15	4
30	2013	OIL WELL HEAD COMPRESSOR	\$ 575.636,85	5
31	2012	CENTRIFUGAL PUMP MTC-65 CW ELMOT	\$ 118.856,13	4
32	2010	FIRE SUPRESSION SYSTEM DI PWT PLT	\$ 121.225,54	5

33	2010	1 UNIT ACCUMULATOR UNIT HIGH PRESSURE PUMP HOIST B	\$ 89.660,39	4
34	2012	HIGH PRES SEPARATOR PACKAGE	\$ 620.675,41	4
35	2010	1 UNIT GAS SCRUBBER LP KAPASITAS 10 MMSCFD	\$ 107.899,51	4
36	2010	1 UNIT ELECTRONIC MEMORY RECORDER	\$ 28.725,90	4
37	2015	WAUKESHA GAS ENGINE	\$ 582.837,04	5
38	2015	GENSET GAS ENGINE CATERPILLAR	\$ 129.015,12	5
39	2015	3 PHASE INLET SEPARATOR	\$ 142.259,58	4
40	2015	TRIM COOLER	\$ 180.480,30	4
41	2015	GLYCOL REBOILER	\$ 216.853,49	4
42	2015	PIPING SYSTEM	\$ 835.428,63	4
43	2014	TL Gas 8" 900M SCH 40	\$ 167.903,92	4
44	2011	POWER PLANT 1200 KVA POWER SUPPLY	\$ 1.810.322,47	5
45	2014	JALUR KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN TINGGI	\$ 183.798,14	5
46	2014	Jockey Pump SP 3	\$ 33.537,00	4
47	2015	RUMAH CONTROL ROOM 10 X 15	\$ 30.103,14	5
48	2012	2 ANGUS LD 1800 CAP.500 GPM AT 100 PSI	\$ 73.735,96	4
49	2012	PERALATAN FAS. PENANGANAN LIMBAH B3	\$ 148.993,71	4
50	2015	TRUCK MOUNTED WIRELINE UNIT DDU TM 001	\$ 467.250,00	5

Sumber: Data yang diperoleh dari perusahaan

2. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Berdasarkan Metode Saldo Menurun Dan Metode Garis Lurus

a. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Berdasarkan Metode Saldo Menurun

- 1) Rumus perhitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu:

Biaya penyusutan kelompok I (tahun ke-1) = nilai buku awal x 50%

Tabel 4.2 Perhitungan Penyusutan Berdasarkan Metode saldo Menurun

N O	Umur (Tahun)	capital date	uraian	kelo mpo k	Tarif	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan 2013 (\$)	Biaya Penyusutan 2014 (\$)	Biaya Penyusutan 2015 (\$)
1	5	2015	2 PHASE FUEL GAS SCRUBBER	I	50%	\$ 90.182,41			45.091,21
2	5	2015	DE - ETHANIZER TOWER	I	50%	\$ 357.750,52			178.875,26
3	5	2013	SUMUR GAS A1	I	50%	\$ 4.101.696,50	2.050.848,25	1.025.424,13	512.712,06
4	5	2013	CASING-1	I	50%	\$ 647.046,84	323.523,42	161.761,71	80.880,86
5	4	2013	GAS KROMATOGRAP GC-17A WITH 2 DETECTOR	I	50%	\$ 332.233,17	166.116,59	83.058,29	41.529,15
6	5	2013	CASING GC5 (1880 m)	I	50%	\$ 160.822,61	80.411,31	40.205,65	20.102,83
7	4	2013	2 PORTABLE FIRE PUMP 4 SUCTION 100 PSI	I	50%	\$ 73.306,78	36.653,39	18.326,70	9.163,35
8	4	2013	DISPERSANT SPRAYER FIRE STATION	I	50%	\$ 544.472,97	272.236,49	136.118,24	68.059,12
9	4	2015	DIESEL ENGINE FIRE PUMP 2000 GPM	I	50%	\$ 230.000,00			115.000,00
10	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM	I	50%	\$ 13.163,63			6.581,82
11	5	2009	1 UNIT FIRE TRUCK KAP. 5000 LTR PEMADAM	I	50%	\$ 171.940,86	85.970,43		
12	9	2009	1 UNIT SPEED BOAT MERK HAKISU	I	50%	\$ 58.363,64	29.181,82	14.590,91	7.295,46
13	5	2009	1 UNIT BULDOZER TYPE D4 UTK TOPO	I	50%	\$ 101.963,35	50.981,68		
14	5	2009	LOADING LINE 30" 500 M DARI MGS KE LOCAL 2	I	50%	\$ 388.809,76	194.404,88		
15	5	2009	PIPA 14" X 2.000M ANTAR TANKI	I	50%	\$ 330.771,21	165.385,61		
16	5	2009	PIPA 12"X2.500M	I	50%	\$ 434.449,30	217.224,65		
17	5	2009	SBM ARUBAY	I	50%	\$ 2.012.663,41	1.006.331,71		
18	5	2009	CENTRIFUGAL PUMP KAP. 30 M3/JAM PPP	I	50%	\$ 24.466,41	12.233,21		
19	5	2009	1 TRANS PUMP C/W GAS ENG.SP3&8 (10F2)	I	50%	\$ 436.208,51	218.104,26		
20	5	2011	GENSET 30KVA *U267893V*	I	50%	\$ 27.914,90	13.957,45	6.978,73	3.489,36
21	4	2011	FIRE PROTECTION	I	50%	\$ 40.499,56	20.249,78	10.124,89	
22	4	2011	FIRE PROTECTION	I	50%	\$ 42.654,90	21.327,45	10.663,73	
23	4	2011	SPIRAL DRI COLAR 31/2" HOIST BIR 100	I	50%	\$ 2.909,38	1.454,69	727,35	
24	5	2011	MAINLINE FLOATING HOSE 12" 22130.12	I	50%	\$ 147.654,95	73.827,48	36.913,74	18.456,87
25	4	2011	SISTEM PROTEKSIKATODIK PIPA30"	I	50%	\$ 142.761,80	71.380,90	35.690,45	
26	4	2012	GASFLOW COMP C/W 3 PENRECORDER	I	50%	\$ 273.989,92	136.994,96	68.497,48	34.248,74
27	4	2012	FIRE PUMP LIGHT WEIGHT	I	50%	\$ 49.309,69	24.654,85	12.327,42	6.163,71
28	5	2014	2 UNIT GENSET,NATURAL GAS ENGINE KAP.62.5	I	50%	\$ 141.108,08		70.554,04	35.277,02
29	4	2014	PORTABLE FIRE PUMP KAP. 500 GPM	I	50%	\$ 45.493,15		22.746,58	11.373,29
30	5	2013	OIL WELL HEAD COMPRESSOR	I	50%	\$ 575.636,85	287.818,43	143.909,21	71.954,61
31	4	2012	CENTRIFUGAL PUMP MTC-65 C/W ELMOT	I	50%	\$ 118.856,13	59.428,07	29.714,03	14.857,02
32	5	2010	FIRE SUPRESSION SYSTEM DI PWT PLT	I	50%	\$ 121.225,54	60.612,77	30.306,39	
33	4	2010	1 UNIT ACCUMULATOR UNIT HIGH PRESSURE PUM	I	50%	\$ 89.660,39	44.830,20		
34	4	2012	HIGH PRES SEPARATOR PACKAGE	I	50%	\$ 620.675,41	310.337,71	155.168,85	77.584,43
35	4	2010	1 UNIT GAS SCRUBBER LP KAPASITAS 10 MMSCF	I	50%	\$ 107.899,51	53.949,76		
36	4	2010	1 UNIT ELECTRONIC MEMORY RECORDER	I	50%	\$ 28.725,90	14.362,95		
37	5	2015	WAUKESHA GAS ENGINE	I	50%	\$ 582.837,04			291.418,52
38	5	2015	GENSET GAS ENGINE CATERPILLAR	I	50%	\$ 129.015,12			64.507,56
39	4	2015	3 PHASE INLET SEPARATOR	I	50%	\$ 142.259,58			71.129,79
40	4	2015	TRIM COOLER	I	50%	\$ 180.480,30			90.240,15
41	4	2015	GLYCOL REBOILER	I	50%	\$ 216.853,49			108.426,75
42	4	2015	PIPING SYSTEM	I	50%	\$ 835.428,63			417.714,32
43	4	2014	TL Gas 8" 900M SCH 40	I	50%	\$ 167.903,92		83.951,96	41.975,98
44	5	2011	POWER PLANT 1200 KVA POWER SUPPLY	I	50%	\$ 1.810.322,47	905.161,24	452.580,62	226.290,31
45	5	2014	JALUR KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN TINGGI	I	50%	\$ 183.798,14		91.899,07	45.949,54
46	4	2014	Jockey Pump SP 3	I	50%	\$ 33.537,00		16.768,50	8.384,25
47	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM 10 X 15	I	50%	\$ 30.103,14			15.051,57
48	4	2012	2 ANGUS LD 1800 CAP.500 GPM AT 100 PSI	I	50%	\$ 73.735,96	36.867,98	18.433,99	9.217,00
49	4	2012	PERALATAN FAS. PENANGANAN LIMBAH B3	I	50%	\$ 148.993,71	74.496,86	37.248,43	18.624,21
50	5	2015	TRUCK MOUNTED WIRELINE UNIT DDU TM 001	I	50%	\$ 467.250,00			233.625,00
Total						\$ 18.089.806,44	7.121.321,15	2.814.691,07	3.001.251,07

Sumber: Data yang diolah

b. Menghitung Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan
Berdasarkan Metode Garis Lurus

- 1) Rumus perhitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu:

Biaya penyusutan kelompok I (tahun ke-1) = nilai buku awal x 25%

Tabel 4.3 Perhitungan Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus

No	Umur (Tahun)	capital date	Uraian	kelo mpok	Tarif	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan 2013 (\$)	Biaya Penyusutan 2014 (\$)	Biaya Penyusutan 2015 (\$)
1	5	2015	2 PHASE FUEL GAS SCRUBBER	I	25%	\$ 90.182,41			22.545,60
2	5	2015	DE - ETHANIZER TOWER	I	25%	\$ 357.750,52			89.437,63
3	5	2013	SUMUR GAS A1	I	25%	\$ 4.101.696,50	1.025.424,13	256.356,03	64.089,01
4	5	2013	CASING-1	I	25%	\$ 647.046,84	161.761,71	40.440,43	10.110,11
5	4	2013	GAS KROMATOGRAP GC-17A WITH 2 DETECTOR	I	25%	\$ 332.233,17	83.058,29	20.764,57	5.191,14
6	5	2013	CASING GC5 (1880 m)	I	25%	\$ 160.822,61	40.205,65	10.051,41	2.512,85
7	4	2013	2 PORTABLE FIRE PUMP 4 SUCTION 100 PSI	I	25%	\$ 73.306,78	18.326,70	4.581,67	1.145,42
8	4	2013	DISPERSANT SPRAYER FIRE STATION	I	25%	\$ 544.472,97	136.118,24	34.029,56	8.507,39
9	4	2015	DIESEL ENGINE FIRE PUMP 2000 GPM	I	25%	\$ 230.000,00			57.500,00
10	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM	I	25%	\$ 13.163,63			3.290,91
11	5	2009	1 UNIT FIRE TRUCK KAP. 5000 LTR PEMADAM	I	25%	\$ 171.940,86	42.985,22		
12	9	2009	1 UNIT SPEED BOAT MERK HAKISU	I	25%	\$ 58.363,64	14.590,91	3.647,73	911,93
13	5	2009	1 UNIT BULDOZER TYPE D4 UTK TOPO	I	25%	\$ 101.963,35	25.490,84		
14	5	2009	LOADING LINE 30" 500 M DARI MGS KE LOCAL 2	I	25%	\$ 388.809,76	97.202,44		
15	5	2009	PIPA 14" X 2.000M ANTAR TANKI	I	25%	\$ 330.771,21	82.692,80		
16	5	2009	PIPA 12"X2.500M	I	25%	\$ 434.449,30	108.612,33		
17	5	2009	SBM ARUBAY	I	25%	\$ 2.012.663,41	503.165,85		
18	5	2009	CENTRIFUGAL PUMP KAP. 30 M3/JAM PPP	I	25%	\$ 24.466,41	6.116,60		
19	5	2009	1 TRANS PUMP C/W GAS ENG.SP3&8 (IOF2)	I	25%	\$ 436.208,51	109.052,13		
20	5	2011	GENSET 30KVA *U267893V*	I	25%	\$ 27.914,90	6.978,73	1.744,68	436,17
21	4	2011	FIRE PROTECTION	I	25%	\$ 40.499,56	10.124,89	2.531,22	
22	4	2011	FIRE PROTECTION	I	25%	\$ 42.654,90	10.663,73	2.665,93	
23	4	2011	SPIRAL DRI COLAR 31/2" HOIST BIR 100	I	25%	\$ 2.909,38	727,35	181,84	
24	5	2011	MAINLINE FLOATING HOSE 12" 22130.12	I	25%	\$ 147.654,95	36.913,74	9.228,43	2.307,11
25	4	2011	SISTEM PROTEKSIKATODIK PIPA30"	I	25%	\$ 142.761,80	35.690,45	8.922,61	
26	4	2012	GASFLOW COMP C/W 3 PENRECORDER	I	25%	\$ 273.989,92	68.497,48	17.124,37	4.281,09
27	4	2012	FIRE PUMP LIGHT WEIGHT	I	25%	\$ 49.309,69	12.327,42	3.081,86	770,46
28	5	2014	2 UNIT GENSET,NATURAL GAS ENGINE KAP.62.5	I	25%	\$ 141.108,08		35.277,02	8.819,26
29	4	2014	PORTABLE FIRE PUMP KAP. 500 GPM	I	25%	\$ 45.493,15		11.373,29	2.843,32
30	5	2013	OIL WELL HEAD COMPRESSOR	I	25%	\$ 575.636,85	143.909,21	35.977,30	8.994,33
31	4	2012	CENTRIFUGAL PUMP MTC-65 CW ELMOT	I	25%	\$ 118.856,13	29.714,03	7.428,51	1.857,13
32	5	2010	FIRE SUPPRESSION SYSTEM DI PWT PLT	I	25%	\$ 121.225,54	30.306,39	7.576,60	
33	4	2010	1 UNIT ACCUMULATOR UNIT HIGH PRESSURE PU	I	25%	\$ 89.660,39	22.415,10		
34	4	2012	HIGH PRES SEPARATOR PACKAGE	I	25%	\$ 620.675,41	155.168,85	38.792,21	9.698,05
35	4	2010	1 UNIT GAS SCRUBBER LP KAPASITAS 10 MMSCF	I	25%	\$ 107.899,51	26.974,88		
36	4	2010	1 UNIT ELECTRONIC MEMORY RECORDER	I	25%	\$ 28.725,90	7.181,48		
37	5	2015	WAUKESHA GAS ENGINE	I	25%	\$ 582.837,04			145.709,26
38	5	2015	GENSET GAS ENGINE CATERPILLAR	I	25%	\$ 129.015,12			32.253,78
39	4	2015	3 PHASE INLET SEPARATOR	I	25%	\$ 142.259,58			35.564,90
40	4	2015	TRIM COOLER	I	25%	\$ 180.480,30			45.120,08
41	4	2015	GLYCOL REBOILER	I	25%	\$ 216.853,49			54.213,37
42	4	2015	PIPING SYSTEM	I	25%	\$ 835.428,63			208.857,16
43	4	2014	TL Gas 8" 900M SCH 40	I	25%	\$ 167.903,92		41.975,98	10.494,00
44	5	2011	POWER PLANT 1200 KVA POWER SUPPLY	I	25%	\$ 1.810.322,47	452.580,62	113.145,15	28.286,29
45	5	2014	JALUR KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN TINGGI	I	25%	\$ 183.798,14		45.949,54	11.487,38
46	4	2014	Jockey Pump SP 3	I	25%	\$ 33.537,00		8.384,25	2.096,06
47	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM 10 X 15	I	25%	\$ 30.103,14			7.525,79
48	4	2012	2 ANGUS LD 1800 CAP.500 GPM AT 100 PSI	I	25%	\$ 73.735,96	18.433,99	4.608,50	1.152,12
49	4	2012	PERALATAN FAS. PENANGANAN LIMBAH B3	I	25%	\$ 148.993,71	37.248,43	9.312,11	2.328,03
50	5	2015	TRUCK MOUNTED WIRELINE UNIT DDU TM 001	I	25%	\$ 467.250,00			116.812,50
Total						\$ 18.089.806,44	3.560.660,57	775.152,80	1.007.149,62

Sumber: Data yang diolah

3. Membandingkan Biaya Penyusutan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus

Total biaya penyusutan setiap tahun berdasarkan metode saldo menurun dapat dilihat pada (Tabel 4.2).

Dibawah ini adalah merupakan tabel yang merupakan hasil perhitungan biaya penyusutan untuk setiap tahun berdasarkan metode saldo menurun.

Tabel 4.4 Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun

NO	Tahun		
	2013	2014	2015
1	\$ 7.121.321,15		
2		\$ 2.814.691,07	
3			\$ 3.001.251,07

Sumber: Data hasil perhitungan harta berwujud bukan bangunan

Total biaya penyusutan setiap tahun berdasarkan metode garis lurus dapat dilihat pada (Tabel 4.3).

Dibawah ini adalah merupakan tabel yang merupakan hasil perhitungan biaya penyusutan untuk setiap tahun berdasarkan metode garis lurus.

Tabel 4.5 Biaya Penyusutan berdasarkan Metode Garis Lurus

NO	Tahun		
	2013	2014	2015
1	\$ 3.560.660,57		
2		\$ 715.152,80	
3			\$ 1.007.149,62

Sumber: Data hasil perhitungan harta berwujud bukan bangunan

Biaya penyusutan pada Tahun 2013, 2014, 2015 lebih besar jika perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, jika dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus hasilnya lebih kecil. Hal ini disebabkan karena biaya penyusutan merupakan pengurangan penghasilan bruto sehingga semakin besar biaya penyusutan maka Penghasilan Kena Pajak semakin kecil dan pada akhirnya Pajak Penghasilan juga semakin kecil.

4. Menghitung dan Membandingkan Besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus

Tabel 4.6
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan antara Metode Saldo Menurun dengan Metode Garis Lurus

Tahun	Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak		Biaya Penyusutan		Penghasilan Kena Pajak		Pajak Penghasilan	
	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)
2013	6.999.251.000	6.999.251.000	7.121.321,15	3.560.660,57	6.992.129.678,85	6.995.690.339,43	1.748.032.420	1.748.922.585
2014	4.710.490.000	4.710.490.000	2.814.691,07	715.152,80	4.707.675.308,93	4.709.774.847,20	1.176.918.827	1.177.443.712
2015	2.924.475.000	2.924.475.000	3.001.251,07	1.007.149,62	2.921.473.748,93	2.923.467.850	730.368.437	730.866.963
Total	14.634.216.000	14.634.216.000	12.937.263,29	5.282.962,99	14.621.278.736,71	14.628.933.037,01	3.655.319.684	3.657.233.259

Sumber: Data yang diolah

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pada tabel 4.7 yaitu:

Peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto komersial luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan kompensasi kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak.

Pada tahun 2013, 2014, 2015, biaya penyusutan berdasarkan metode saldo menurun lebih besar dari pada metode garis lurus sehingga Penghasilan Kena Pajak berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus. Penghasilan Kena Pajak yang dihasilkan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus sehingga Pajak Penghasilan berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus. Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada metode garis lurus.

5. Melihat Hubungan antara Metode Penyusutan Aktiva Tetap dengan Pajak Penghasilan

Metode penyusutan aktiva tetap memiliki pengaruh dan hubungan terhadap Pajak Penghasilan, yaitu dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak sehingga dapat memperkecil Pajak Penghasilan terutang seperti yang dijelaskan pada (Tabel 4.6), dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa metode penyusutan aktiva tetap dapat menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan terutang yang berbeda, maka dari itu sebuah perusahaan harus bisa menentukan metode penyusutan apa yang tepat digunakan untuk meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

Dan disini PT.Pertamina EP Pangkalan Susu menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva tetap bukan bangunan, jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun jumlah pajak penghasilan seharusnya bisa menjadi lebih kecil dari pada sebelumnya.

6. Memilih Metode Penyusutan yang Menghasilkan Pajak Penghasilan Terutang yang Paling Kecil

Metode penyusutan saldo menurun menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan berdasarkan pembahasan diatas. Metode penyusutan saldo menurun akan menghemat Pajak sebesar \$ 1.913.575.

E. Hasil Penelitian

1. Penerapan Perhitungan Metode Penyusutan Aktiva Tetap PT. Pertamina EP Pangkalan Susu

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pertamina EP Pangkalan Susu terhadap penerapan metode penyusutan aktiva tetap. PT. Pertamina EP Pangkalan Susu telah melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, perhitungan penyusutan yang digunakan PT.Pertamina EP Pangkalan Susu dapat dilihat pada (Tabel 4.3) dijelaskan metode

penyusutan garis lurus terhadap aktiva tetap bukan bangunan menghasilkan penyusutan pada tahun 2013 sebesar \$ 3.560.660,57 dan pada tahun 2014 sebesar \$ 715.152,80 dan pada tahun 2015 sebesar \$ 1.007.149,62. Penerapan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan tetapi disini peneliti bahwasanya penggunaan metode penyusutan garis lurus yang digunakan oleh perusahaan tidaklah efektif.

Dalam ketentuan perpajakan yang dijelaskan pada UU PPh, metode penyusutan yang diperbolehkan perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, setelah penulis melakukan perhitungan terhadap kedua metode yang diperbolehkan perpajakan, penulis menemukan bahwasanya metode penyusutan saldo menurun menghasilkan penyusutan yang lebih besar sehingga menambah pada beban usaha dan akan menurunkan nilai Pajak Penghasilan (PPh), jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun nilai penyusutan pada tahun 2013 sebesar \$ 7.121.321,15 dan pada tahun 2014 sebesar \$ 2.814.691,07 dan pada tahun 2015 sebesar \$ 3.001.251,07. Jumlah yang dihasilkan kedua metode berbeda sehingga memberikan selisih nilai penyusutan pada tahun 2013 sebesar \$ 3.560.660,58 dan pada tahun 2014 sebesar \$ 2.099.538,27 dan pada tahun 2015 sebesar \$ 1.994.101,45, dari penjelasan diatas kita dapat melihat penggunaan metode penyusutan yang diterapkan oleh PT.Pertamina EP Pangkalan Susu tidaklah efektif, yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus dikarenakan menghasilkan selisih yang sangat besar dibandingkan dengan metode penyusutan saldo menurun. Jika PT. Pertamina EP Pangkalan Susu menerapkan dan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, nilai Pajak Penghasilan akan lebih kecil dan metode penyusutan saldo menurun lebih efektif dan efisien jika digunakan oleh perusahaan.

2. Hubungan Perhitungan Aktiva Tetap terhadap PPh

Dari hasil pembahasan yang diteliti, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu memiliki Penghasilan kena Pajak dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dari tahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar \$ 14.621.278.736,71

dan dengan menggunakan metode garis lurus dari tahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar \$ 14.628.933.037,01. Jika perusahaan tidak menggunakan metode penyusutan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan maka Penghasilan Kena Pajak perusahaan akan sebesar \$ 14.634.216.000, maka kita dapat melihat bahwasanya metode penyusutan aktiva tetap memiliki hubungan yang sangat mempengaruhi nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga mempengaruhi nilai Pajak Penghasilan (PPh). Jika kita melihat bahwasanya PT. Pertamina EP Pangkalan Susu memiliki peredaran usaha lebih dari 50 milyar, maka sesuai UU Perpajakan tarif PPh badan diatas 50 milyar sebesar 25%, maka hasil untuk Pajak Penghasilan dengan metode saldo menurun sebesar \$ 3.655.319.684 dan jika menggunakan metode garis lurus sebesar \$ 3.657.233.259, dan apabila perusahaan tidak menggunakan metode penyusutan maka nilai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar \$ 3.658.554.000. jadi kita dapat mengetahui bahwasanya metode penyusutan aktiva tetap akan sangat berpengaruh dalam meminimalkan nilai Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan kesimpulannya adalah:

1. Metode penyusutan garis lurus yang diterapkan oleh PT.Pertamina EP Pangkalan Susu untuk penyusutan aktiva tetap bukan bangunan telah sesuai dengan PSAK dan telah sesuai dan tidak menyalahi peraturan perpajakan dalam pemakaian metode penyusutan, metode yang digunakan PT.Pertamina EP menghasilkan beban penyusutan dari tahun 2013 sampai 2015 sebesar \$ 5.282.962,99
2. Pemilihan dan penentuan metedo penyusutan sangat penting dikarenakan sangat memiliki hubungan dalam menentukan besaran nilai Pajak Penghasilan (PPh), dikarenakan penyusutan aktiva tetap dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berhubungan dan berkaitan dengan PPh.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk hasil penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Perusahaan dapat memperkecil Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan dengan merubah metode penyusutan yang digunakan, yaitu dengan metode penyusutan saldo menurun seperti yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini. Dan perusahaan harus memiliki perencanaan pajak yang baik, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dan melakukan penghematan kas keluar dan perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.
2. Perusahaan harus selalu menggunakan metode penyusutan aktiva tetap, karena sangat baik untuk meminimalkan nilai Pajak Penghasilan (PPh)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, *Ekonomi: untuk SMA dan MA XI*. t.t.p.: Esis, 2007, jilid II.
- Diana, Anastasia & Setiawati Lilis (ed.) *perpajakan: Teori dan Peraturan terkini*. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Efferin, Sujoko. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ikhsan, Arfan. et. Al., *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Mudjihardjo, et. Al., *Panduan Pelajaran Akuntansi 2*. Bandung: PT. Eresco, 1998.
- Muljono, Djoko. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Muljono, Djoko & Wicaksono Barumi (ed.) *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Grasindo, Cet.2, 2004.
- Purba, Radiks. *Akuntansi Untuk Manajer*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1996.
- Pohan, Chairul Anwar. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Q .S. Al-Baqarah (2): 267.
- Q .S. Al-Hujurat (49): 15.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. cetakan pertama, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Rangkuti, Efendi Indra, et. al., *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera, ed 3, 2018.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat, ed.6, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Riset Skripsi dan Tesis dengan SPSS 22*. Jakarta : Elex Media Komputer, 2014.
- Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat, 2001.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, 2003.

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, ed. 4, 2008.

Supramono and Damayanti Theresia woro (ed.) *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI, 2010.

Yusup, Muhammad. *Matematika: Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

B. Website

Belajar Perpajakan. “Pengertian Penghasilan: www.pajakonline.com. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019

Fawaz Muhammad Wasito Abu. “Hukum Pajak dalam Fiqih Islam: <https://abufawaz.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2019

Nasikhudinis, “PSAK 16-Aset Tetap: Aspek Akuntansi dan Aspek Pajaknya, <https://nasikhudinisme.com>. Diunduh pada tanggal 29 Maret 2019

Prasetyo, Adi Dwi. “PSAK no 46 Pajak Penghasilan, <https://dconsultingbusinessconsultant.com>. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019

Redaksi Konsultasi Syariah, “Hulum Pajak dan Bekerja di Pajak, <https://konsultasisyariah.com>. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2019

Rohman, Nur. “Pengertian Konsep Nilai Waktu Uang dan Contohnya, <https://akuntanonline.com>. Diunduh pada tanggal 6 April 2019

Side, Mersey. “Nilai Waktu Uang (Time Value of Money), <http://kazekage08suna.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 6 April 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan Metode Penyusutan Garis Lurus

No	Umur (Tahun)	capital date	Uraian	kelo mpok	Tarif	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan 2013 (\$)	Biaya Penyusutan 2014 (\$)	Biaya Penyusutan 2015 (\$)
1	5	2015	2 PHASE FUEL GAS SCRUBBER	I	25%	\$ 90.182,41			22.545,60
2	5	2015	DE - ETHANIZER TOWER	I	25%	\$ 357.750,52			89.437,63
3	5	2013	SUMUR GAS A1	I	25%	\$ 4.101.696,50	1.025.424,13	256.356,03	64.089,01
4	5	2013	CASING-1	I	25%	\$ 647.046,84	161.761,71	40.440,43	10.110,11
5	4	2013	GAS KROMATOGRAP GC-17A WITH 2 DETECTOR	I	25%	\$ 332.233,17	83.058,29	20.764,57	5.191,14
6	5	2013	CASING GC5 (1880 m)	I	25%	\$ 160.822,61	40.205,65	10.051,41	2.512,85
7	4	2013	2 PORTABLE FIRE PUMP 4 SUCTION 100 PSI	I	25%	\$ 73.306,78	18.326,70	4.581,67	1.145,42
8	4	2013	DISPERSANT SPRAYER FIRE STATION	I	25%	\$ 544.472,97	136.118,24	34.029,56	8.507,39
9	4	2015	DIESEL ENGINE FIRE PUMP 2000 GPM	I	25%	\$ 230.000,00			57.500,00
10	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM	I	25%	\$ 13.163,63			3.290,91
11	5	2009	1 UNIT FIRE TRUCK KAP. 5000 LTR PEMADAM	I	25%	\$ 171.940,86	42.985,22		
12	9	2009	1 UNIT SPEED BOAT MERK HAKISU	I	25%	\$ 58.363,64	14.590,91	3.647,73	911,93
13	5	2009	1 UNIT BULDOZER TYPE D4 UTK TOPO	I	25%	\$ 101.963,35	25.490,84		
14	5	2009	LOADING LINE 30" 500 M DARI MGS KE LOCAL 2	I	25%	\$ 388.809,76	97.202,44		
15	5	2009	PIPA 14" X 2.000M ANTAR TANKI	I	25%	\$ 330.771,21	82.692,80		
16	5	2009	PIPA 12"X2.500M	I	25%	\$ 434.449,30	108.612,33		
17	5	2009	SBM ARUBAY	I	25%	\$ 2.012.663,41	503.165,85		
18	5	2009	CENTRIFUGAL PUMP KAP. 30 M3/JAM PPP	I	25%	\$ 24.466,41	6.116,60		
19	5	2009	1 TRANS PUMP C/W GAS ENG.SP3&8 (1OF2)	I	25%	\$ 436.208,51	109.052,13		
20	5	2011	GENSET 30KVA *U267893V*	I	25%	\$ 27.914,90	6.978,73	1.744,68	436,17
21	4	2011	FIRE PROTECTION	I	25%	\$ 40.499,56	10.124,89	2.531,22	
22	4	2011	FIRE PROTECTION	I	25%	\$ 42.654,90	10.663,73	2.665,93	
23	4	2011	SPIRAL DRI COLAR 31/2" HOIST BIR 100	I	25%	\$ 2.909,38	727,35	181,84	
24	5	2011	MAINLINE FLOATING HOSE 12" 22130.12	I	25%	\$ 147.654,95	36.913,74	9.228,43	2.307,11
25	4	2011	SISTEM PROTEKSIKATODIK PIPA30"	I	25%	\$ 142.761,80	35.690,45	8.922,61	
26	4	2012	GASFLOW COMP C/W 3 PENRECORDER	I	25%	\$ 273.989,92	68.497,48	17.124,37	4.281,09
27	4	2012	FIRE PUMP LIGHT WEIGHT	I	25%	\$ 49.309,69	12.327,42	3.081,86	770,46
28	5	2014	2 UNIT GENSET,NATURAL GAS ENGINE KAP.62.5	I	25%	\$ 141.108,08		35.277,02	8.819,26
29	4	2014	PORTABLE FIRE PUMP KAP. 500 GPM	I	25%	\$ 45.493,15		11.373,29	2.843,32
30	5	2013	OIL WELL HEAD COMPRESSOR	I	25%	\$ 575.636,85	143.909,21	35.977,30	8.994,33
31	4	2012	CENTRIFUGAL PUMP MTC-65 CW ELMOT	I	25%	\$ 118.856,13	29.714,03	7.428,51	1.857,13
32	5	2010	FIRE SUPRESSION SYSTEM DI PWT PLT	I	25%	\$ 121.225,54	30.306,39	7.576,60	
33	4	2010	1 UNIT ACCUMULATOR UNIT HIGH PRESSURE PU	I	25%	\$ 89.660,39	22.415,10		
34	4	2012	HIGH PRES SEPARATOR PACKAGE	I	25%	\$ 620.675,41	155.168,85	38.792,21	9.698,05
35	4	2010	1 UNIT GAS SCRUBBER LP KAPASITAS 10 MMSCF	I	25%	\$ 107.899,51	26.974,88		
36	4	2010	1 UNIT ELECTRONIC MEMORY RECORDER	I	25%	\$ 28.725,90	7.181,48		
37	5	2015	WAUKESHA GAS ENGINE	I	25%	\$ 582.837,04			145.709,26
38	5	2015	GENSET GAS ENGINE CATERPILLAR	I	25%	\$ 129.015,12			32.253,78
39	4	2015	3 PHASE INLET SEPARATOR	I	25%	\$ 142.259,58			35.564,90
40	4	2015	TRIM COOLER	I	25%	\$ 180.480,30			45.120,08
41	4	2015	GLYCOL REBOILER	I	25%	\$ 216.853,49			54.213,37
42	4	2015	PIPING SYSTEM	I	25%	\$ 835.428,63			208.857,16
43	4	2014	TL Gas 8" 900M SCH 40	I	25%	\$ 167.903,92		41.975,98	10.494,00
44	5	2011	POWER PLANT 1200 KVA POWER SUPPLY	I	25%	\$ 1.810.322,47	452.580,62	113.145,15	28.286,29
45	5	2014	JALUR KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN TINGGI	I	25%	\$ 183.798,14		45.949,54	11.487,38
46	4	2014	Jockey Pump SP 3	I	25%	\$ 33.537,00		8.384,25	2.096,06
47	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM 10 X 15	I	25%	\$ 30.103,14			7.525,79
48	4	2012	2 ANGUS LD 1800 CAP.500 GPM AT 100 PSI	I	25%	\$ 73.735,96	18.433,99	4.608,50	1.152,12
49	4	2012	PERALATAN FAS. PENANGANAN LIMBAH B3	I	25%	\$ 148.993,71	37.248,43	9.312,11	2.328,03
50	5	2015	TRUCK MOUNTED WIRELINE UNIT DDU TM 001	I	25%	\$ 467.250,00			116.812,50
Total						\$ 18.089.806,44	3.560.660,57	775.152,80	1.007.149,62

Lampiran 2: Perhitungan Metode Penyusutan Saldo Menurun

N O	Umur (Tahun)	capital date	uraian	kelo mpo k	Tarif	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan 2013 (\$)	Biaya Penyusutan 2014 (\$)	Biaya Penyusutan 2015 (\$)
1	5	2015	2 PHASE FUEL GAS SCRUBBER	I	50%	\$ 90.182,41			45.091,21
2	5	2015	DE - ETHANIZER TOWER	I	50%	\$ 357.750,52			178.875,26
3	5	2013	SUMUR GAS A1	I	50%	\$ 4.101.696,50	2.050.848,25	1.025.424,13	512.712,06
4	5	2013	CASING-1	I	50%	\$ 647.046,84	323.523,42	161.761,71	80.880,86
5	4	2013	GAS KROMATOGRAP GC-17A WITH 2 DETECTOR	I	50%	\$ 332.233,17	166.116,59	83.058,29	41.529,15
6	5	2013	CASING GC5 (1880 m)	I	50%	\$ 160.822,61	80.411,31	40.205,65	20.102,83
7	4	2013	2 PORTABLE FIRE PUMP 4 SUCTION 100 PSI	I	50%	\$ 73.306,78	36.653,39	18.326,70	9.163,35
8	4	2013	DISPERSANT SPRAYER FIRE STATION	I	50%	\$ 544.472,97	272.236,49	136.118,24	68.059,12
9	4	2015	DIESEL ENGINE FIRE PUMP 2000 GPM	I	50%	\$ 230.000,00			115.000,00
10	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM	I	50%	\$ 13.163,63			6.581,82
11	5	2009	1 UNIT FIRE TRUCK KAP. 5000 LTR PEMADAM	I	50%	\$ 171.940,86	85.970,43		
12	9	2009	1 UNIT SPEED BOAT MERK HAKISU	I	50%	\$ 58.363,64	29.181,82	14.590,91	7.295,46
13	5	2009	1 UNIT BULDOZER TYPE D4 UTK TOPO	I	50%	\$ 101.963,35	50.981,68		
14	5	2009	LOADING LINE 30" 500 M DARI MGS KE LOCAL 2	I	50%	\$ 388.809,76	194.404,88		
15	5	2009	PIPA 14" X 2.000M ANTAR TANKI	I	50%	\$ 330.771,21	165.385,61		
16	5	2009	PIPA 12"X2.500M	I	50%	\$ 434.449,30	217.224,65		
17	5	2009	SBM ARUBAY	I	50%	\$ 2.012.663,41	1.006.331,71		
18	5	2009	CENTRIFUGAL PUMP KAP. 30 M3/JAM PPP	I	50%	\$ 24.466,41	12.233,21		
19	5	2009	1 TRANS PUMP C/W GAS ENG.SP3&8 (1OF2)	I	50%	\$ 436.208,51	218.104,26		
20	5	2011	GENSET 30KVA *U267893V*	I	50%	\$ 27.914,90	13.957,45	6.978,73	3.489,36
21	4	2011	FIRE PROTECTION	I	50%	\$ 40.499,56	20.249,78	10.124,89	
22	4	2011	FIRE PROTECTION	I	50%	\$ 42.654,90	21.327,45	10.663,73	
23	4	2011	SPIRAL DRI COLAR 31/2" HOIST BIR 100	I	50%	\$ 2.909,38	1.454,69	727,35	
24	5	2011	MAINLINE FLOATING HOSE 12" 22130.12	I	50%	\$ 147.654,95	73.827,48	36.913,74	18.456,87
25	4	2011	SISTEM PROTEKSIKATODIK PIPA30"	I	50%	\$ 142.761,80	71.380,90	35.690,45	
26	4	2012	GASFLOW COMP C/W 3 PENRECORDER	I	50%	\$ 273.989,92	136.994,96	68.497,48	34.248,74
27	4	2012	FIRE PUMP LIGHT WEIGHT	I	50%	\$ 49.309,69	24.654,85	12.327,42	6.163,71
28	5	2014	2 UNIT GENSET,NATURAL GAS ENGINE KAP.62.5	I	50%	\$ 141.108,08		70.554,04	35.277,02
29	4	2014	PORTABLE FIRE PUMP KAP. 500 GPM	I	50%	\$ 45.493,15		22.746,58	11.373,29
30	5	2013	OIL WELL HEAD COMPRESSOR	I	50%	\$ 575.636,85	287.818,43	143.909,21	71.954,61
31	4	2012	CENTRIFUGAL PUMP MTC-65 CW ELMOT	I	50%	\$ 118.856,13	59.428,07	29.714,03	14.857,02
32	5	2010	FIRE SUPRESSION SYSTEM DI PWT PLT	I	50%	\$ 121.225,54	60.612,77	30.306,39	
33	4	2010	1 UNIT ACCUMULATOR UNIT HIGH PRESSURE PU	I	50%	\$ 89.660,39	44.830,20		
34	4	2012	HIGH PRES SEPARATOR PACKAGE	I	50%	\$ 620.675,41	310.337,71	155.168,85	77.584,43
35	4	2010	1 UNIT GAS SCRUBBER LP KAPASITAS 10 MMSCF	I	50%	\$ 107.899,51	53.949,76		
36	4	2010	1 UNIT ELECTRONIC MEMORY RECORDER	I	50%	\$ 28.725,90	14.362,95		
37	5	2015	WAUKESHA GAS ENGINE	I	50%	\$ 582.837,04			291.418,52
38	5	2015	GENSET GAS ENGINE CATERPILLAR	I	50%	\$ 129.015,12			64.507,56
39	4	2015	3 PHASE INLET SEPARATOR	I	50%	\$ 142.259,58			71.129,79
40	4	2015	TRIM COOLER	I	50%	\$ 180.480,30			90.240,15
41	4	2015	GLYCOL REBOILER	I	50%	\$ 216.853,49			108.426,75
42	4	2015	PIPING SYSTEM	I	50%	\$ 835.428,63			417.714,32
43	4	2014	TL Gas 8" 900M SCH 40	I	50%	\$ 167.903,92		83.951,96	41.975,98
44	5	2011	POWER PLANT 1200 KVA POWER SUPPLY	I	50%	\$ 1.810.322,47	905.161,24	452.580,62	226.290,31
45	5	2014	JALUR KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN TINGGI	I	50%	\$ 183.798,14		91.899,07	45.949,54
46	4	2014	Jockey Pump SP 3	I	50%	\$ 33.537,00		16.768,50	8.384,25
47	5	2015	RUMAH CONTROL ROOM 10 X 15	I	50%	\$ 30.103,14			15.051,57
48	4	2012	2 ANGUS LD 1800 CAP.500 GPM AT 100 PSI	I	50%	\$ 73.735,96	36.867,98	18.433,99	9.217,00
49	4	2012	PERALATAN FAS. PENANGANAN LIMBAH B3	I	50%	\$ 148.993,71	74.496,86	37.248,43	18.624,21
50	5	2015	TRUCK MOUNTED WIRELINE UNIT DDU TM 001	I	50%	\$ 467.250,00			233.625,00
Total						\$ 18.089.806,44	7.121.321,15	2.814.691,07	3.001.251,07

Lampiran 3: Perhitungan PPh Berdasarkan Metode Penyusutan

Tahun	Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak		Biaya Penyusutan		Penghasilan Kena Pajak		Pajak Penghasilan	
	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)	Saldo Menurun (\$)	Garis Lurus (\$)
2013	6.999.251.000	6.999.251.000	7.121.321,15	3.560.660,57	6.992.129.678,85	6.995.690.339,43	1.748.032.420	1.748.922.585
2014	4.710.490.000	4.710.490.000	2.814.691,07	715.152,80	4.707.675.308,93	4.709.774.847,20	1.176.918.827	1.177.443.712
2015	2.924.475.000	2.924.475.000	3.001.251,07	1.007.149,62	2.921.473.748,93	2.923.467.850	730.368.437	730.866.963
Total	14.634.216.000	14.634.216.000	12.937.263,29	5.282.962,99	14.621.278.736,71	14.628.933.037,01	3.655.319.684	3.657.233.259

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama : Munazar Husein
2. NIM : 52.15.4.121
3. Tpt/Tgl.Lahir : Mandala, 09 Mei 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Desa Lawe Dua Gabungan, Aceh Tenggara

II. Riwayat Pendidikan

1. Tamatan MIN Kutacane Berijazah 2009
2. Tamatan MTS PP. Raudhatul Hasanah Berijazah 2012
3. Tamatan MAS PP. Raudhatul Hasanah Berijazah 2015
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019

III. Riwayat Organisasi

1. Pengurus BUMD Laundry Organisasi Pelajar Ar-Raudhatul Hasanah 2014-2015
2. Anggota Bidang Pendidikan HMJ Akuntansi Syariah FEBI UINSU 2017-2018
3. MAPERCA HMI FEBI UINSU 2017-2018
4. Latihan Kader 1 HMI FEBI UINSU 2017-2018
5. Wabendum HMI FEBI UINSU 2018-2019
6. Ketua Bidang II SEMA FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018-2019